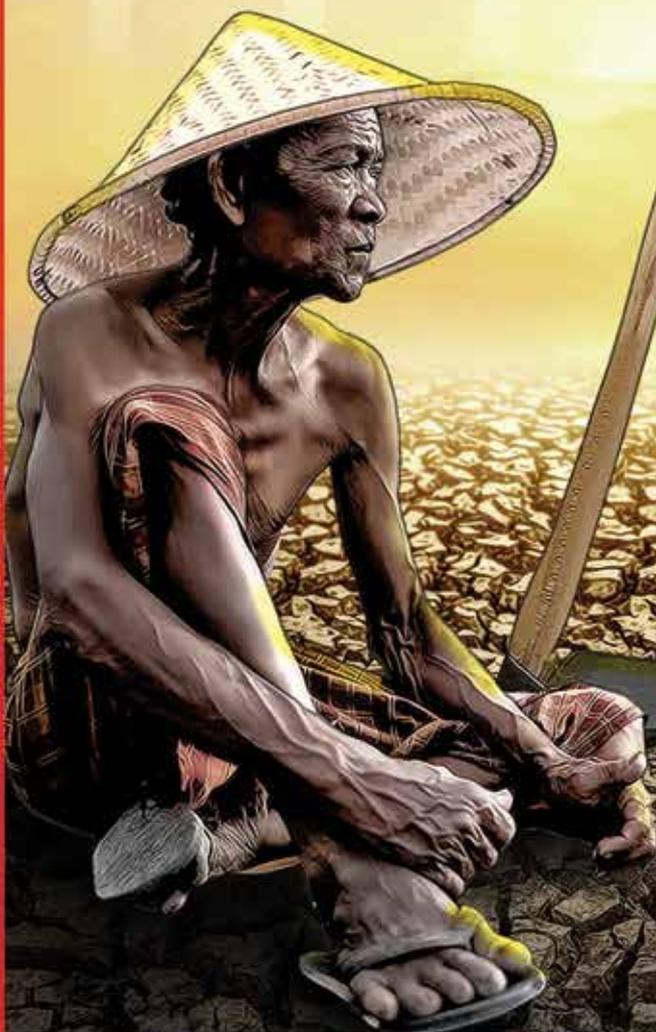




# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



## Agar Pertanian Maju

# Peradaban Pertanian



Pertanian merupakan tonggak sejarah kebudayaan manusia. Hal ini karena pertanian adalah awal mula perkembangan dari kegiatan manusia di zaman lampau.

Mengapa kita perlu membangun sektor pertanian menjadi lebih maju?

Manusia purba, awalnya hanya mengandalkan berburu dan mengumpulkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Hingga akhirnya mulai mengubah hal itu dengan menciptakan sendiri lahan untuk mendapatkan makanan.

Inilah awal mulanya kegiatan menetap dan bercocok tanam untuk bertahan hidup dilakukan. Karena itulah pertanian bukan hal baru dan bahkan menjadi salah satu bagian dari peradaban manusia.

Bersamaan dengan peringatan hari lahir Pancasila yang tiap tahun kita peringati. Pada edisi kali ini, Cirebon Katon menyanyikan tema pertanian. Pasnya sektor ini merupakan bidang yang paling tetap bertahan sejak pandemi Covid 19 menyerang.

Kita tidak pernah menyangka jika pagebluk akan selama ini. Hingga kini, sudah setengah lebih dari total kecamatan berstatus zona merah.

Tentu ini menjadi kendala bagi kita dalam menemui para narasumber, meliputi hingga mengolah data. Namun dengan ikhtiar yang optimal dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kami pun mampu mensiasatinya.

Kita berharap tema besar ini menjadi pengingat bagi kita. Jika pertanian, laiknya ruh yang akan selalu dibutuhkan kecuali jika manusia itu mati.

Sepanjang padi masih difungsikan menjadi kebutuhan pokok makanan, maka selama itu pertanian akan tetap menarik untuk diperbincangkan.

**Salam Cirebon Katon!**

#### Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

#### Pengarah :

**Muklisin Nalahudin, SH, MH.**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**Abdul Rohman**  
(Ketua Komisi 1)

**Mad Saleh**  
(Ketua Komisi 2)

**H. Hermanto, SH**  
(Ketua Komisi 3)

**Siska Karina, MH**  
(Ketua Komisi 4)

#### Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

#### Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Susilaningrat**  
(Kabag persidangan)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Perundang-undangan)

#### Redaktur Pelaksana :

**Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

#### Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

#### Penyunting :

**Wiwin Winarti, S.IP**  
(Kasubag Rapat dan Risalah)

**Ardiles Afla Jatiwanto**  
(Kasubag Rumah Tangga)

#### Redaktur :

**Yusuf**

#### Reporter :

**Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah**

#### Fotografer :

**Qushoy**

#### Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

#### Data dan Riset :

**Oman**

#### Distribusi :

**Firman • Misbah**

#### Korespondensi:

**redaksi.cika@gmail.com**

#### Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon

• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

Sudah Optimalkah Hasil Padi?



## 16 | KILAS

Tinjau Program Vaksinasi Massal



## 18 | PUBLIKA

Keluhan Biaya Operasional Wisata Cikuya



## 20 | INSPIRASI

Chocobond  
Coklat Gurih Hingga Pedas



## 22 | LENSA

Menilik Pengrajin Perahu Jukung



## 24 | PROFIL

Suryanti  
Pilih Hidup Mandiri Pada Usia Muda

## 28 | DINAMIKA

Fraksi DPRD Beri Masukan RPJMD 2019-2024

30 | Tinjau Persiapan Pilwu Serentak

32 | Perlu Irigasi Baru Atasi Banjir Sungai Cikanci

34 | Peserta Jaminan Kesehatan Turun



## 36 | POTENSI

Bendungan Plester  
Kawinkan Wisata Alam dan Kuliner

## 38 | DESA

Pilangsari  
Optimalkan Pertanian dan Olahraga

# Sudah Optimalkah Hasil Padi?

Dibalik produksi padi di Kabupaten Cirebon yang surplus, menyimpan persoalan yang menjadi penyebab masa tanamnya tak capai optimal. Mengapa terjadi?



Foto: Anand / Anand

Kabupaten Cirebon menjadi penyokong padi di Jawa Barat. Secara volume menempati nomor ke 8 setelah Majalengka, Sukabumi, Bekasi, Cianjur, Subang, Karawang, dan Indramayu. Produktivitasnya mencapai 480.525 ton padi gabah

kering giling (GKG) atau sebanyak 276.065 ton beras.

Luas lahan sawah mencapai 95.593 hektare dengan luas padi 45 ribu hektare dan rata-rata masa tanam (MT) dua kali.

Pelaksana Tugas Kepala Dis-pertan Kabupaten Cirebon Ir

Wasman mengklaim, produksi beras Kabupaten Cirebon pada 2020 sebanyak 372 ribu ton yang mengalami surplus hingga 102 ton. Sedangkan konsumsi beras per kapita dengan 2,2 juta penduduk, rata-rata sebesar 115 kg atau 3 ons sehari.



“Ada beberapa daerah di Kabupaten Cirebon yang memiliki masa tanam tiga kali, meskipun jumlah luasnya hanya 4.362 hektare. Wilayah Dukupuntang, Sumber, Palimanan, Plumbon hingga Jamblang bisa 3 kali karena ada sumber air dari daerah Kuningan,” ungkapnya.

Sementara itu daerah dengan masa tanam dua kali, kata Wasman, luasnya mencapai 39.822 hektare. “Perbandingannya, yang tiga kali itu sepertiganya dari 45 Ha. Jadi pada umumnya rata-rata tanam di Kabupaten Cirebon 2 kali dalam setahun,” kata Wasman.

Ia pun mengungkapkan, alasan sebagian wilayah hanya mampu melakukan masa tanam dua kali akibat tidak terjangkaunya sumber air yang berada di Waduk Jati Gede Sumedang maupun mata air di Kuningan. Penyebab salah satunya karena sedimentasi sehingga sungai menjadi dangkal dan tak mampu mengalirkan air hingga ke area

persawahan.

“Seperti sungai di wilayah Cirebon utara, diperlukan pengerukan atau normalisasi agar air sungainya bisa masuk ke sawah. Sebenarnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) rutin mengeruknya. Tetapi karena tingkat sedimentasinya tinggi, terjadi pendangkalan kembali,” ungkapnya.

### Keluhan Petani Padi

Potensi pertanian padi yang besar ini seharusnya menjadi modal besar bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Terlebih sektor pertanian juga menjadi penyumbang perputaran ekonomi tertinggi nomor dua setelah industri konsumsi. Sayangnya, masyarakat belum cukup sejahtera dengan mata pencaharian petani. Penyebabnya petani saat ini masih dihadapkan pada beberapa persoalan.

Pertama, tentang terbatasnya pupuk subsidi. Seperti yang di-

alami Madi, petani padi seluas 100 bata ini mengeluh, lantaran pupuk subsidi yang ia dapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi lahannya. Ia mengaku hanya mendapat 1 kwintal pupuk. Padahal menurutnya, dengan luas lahan 100 bata minimal membutuhkan 2 kwintal pupuk subsidi.

Di sisi lain, petani asal Kecamatan Beber ini tampak cemas dengan besarnya biaya pupuk non subsidi. Harganya Rp 6500 per kg, tiga kali lebih besar dari pupuk subsidi senilai 2400 / kg. Namun mau tidak mau, ia harus membelinya karena untuk memenuhi kebutuhan produksinya.

Perasaan yang sama dialami Dasman, petani asal Desa Karanganyar, Kecamatan Plumbon. Ia mengeluh lantaran luas lahan 1 hektare sawah padinya hanya memperoleh subsidi pupuk 2 kwintal. Padahal untuk memenuhi kebutuhan produksinya itu membutuhkan 3 kwintal lebih pupuk. Sehingga, mau tidak mau, ia pun membeli pupuk non subsidi yang mahal itu.

Baik Madi maupun Dasman sama-sama berharap agar Dis-pertan bisa menyediakan pupuk subsidi kepada para petani sesuai dengan luas lahan garapannya. Mereka juga berharap, Dispertan mampu mendorong perusahaan untuk menurunkan harga pupuk non subsidi.

Namun hal ini, tak dijamin Dispertan yang mengaku telah memberikan pupuk subsidi kepada para petani sesuai dengan luas lahan yang terintegrasi dengan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

“Keluhan kekurangan subsidi pupuk, biasanya karena penggunaannya overdosis. Kita sudah himbau agar alokasi pupuk



subsidi dapat lebih efisien dan pemakaian pupuk tidak *over*," jelas Kepala Dispartan Wasman.

Selain persoalan pupuk bagi para petani, tak kalah pelik pengairan. Seperti lahan pertanian di desa Karanganyar, Plumbon, yang mengalami kesulitan air sejak setahun lalu. Pasalnya, irigasi yang ada dikawasan tersebut rusak sehingga menyebabkan pasokan air terhambat.

Warga pun terpaksa menggunakan mesin pompa untuk mengambil air di sungai kecil ataupun sumur tentunya dengan lebih banyak biaya produksi.

Dasman pun telah mengadu ke perangkat desa setempat atas kondisi demikian. Harapannya, saluran irigasi tersebut dapat segera diperbaiki sehingga proses pengairannya lancar. Sayangnya, kata dia, perangkat desa hingga sekarang belum menggubrisnya. Ia pun harus memutar otak agar pengairannya tetap stabil.

"Sekarang petani di sini me-

makai mesin pompa dari sungai. Kalau tidak mengandalkan irigasi tersier di musim kedua saja, airnya sudah tersendat-sendat. Belum lagi soal biaya. Kalau mengambilnya dari sumur, dari awal sampai akhir produksi bisa mencapai Rp 4 juta. Itu belum biaya produksi yang lainnya," keluh Dasman.

Dasman mengaku, sebelum irigasi rusak, biaya produksi untuk pengairan murah. Hanya musim kedua saja yang memakai pompa dari sungai, karena air yang mengalir ke irigasi debitnya mulai sedikit. Ia pun berharap pemerintah bisa memperbaiki saluran yang rusak ini secepatnya.

Sementara itu Dispartan menampik, menurut Wasman, kerusakan irigasi ini tengah dalam penanganan. Saat ini Dispartan masih mendata jumlah luasan irigasi tersier yang rusak. Ia mencatat jumlahnya saat ini mencapai 60 persen. Namun

diakunya, ia belum memiliki jumlah secara keseluruhan luas irigasi tersier yang rusak.

"Nanti diperoleh data keseluruhan jumlah iregasi tersier yang masih baik dan yang sudah rusak. Tetapi di Rencana Strategis program perangkat daerah tahun 2022-2024 sudah masuk sebesar 60 persen irigasi tersier mengalami kerusakan yang akan kita perbaiki," ungkapnya.

#### Solusi Embung dan Teknologisasi

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Cakra menyadari jika pertanian menjadi salah satu sektor pemangku pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Sehingga menurutnya, sangat potensial untuk ditingkatkan lebih maju. Namun menurutnya saat ini masih banyak persoalan yang harus dibenahi.

Pertama, kekurangan perairan yang menyebabkan petani



sulit mengairi lahan dan berdampak pada jumlah masa tanam. Padahal jika melihat sumberdaya alam yang ada, Kabupaten Cirebon memiliki alam yang strategis.

Ia mencontohkan Setu Patok dan Setu Sedong misalnya, yang berpotensi menjawab persoalan kekurangan air bagi petani dengan membangun embung dan membuat saluran air.

"Nantinya, pasokan air dari setu itu bisa ditampung di embung dan dapat dihantarkan saat musim kemarau tiba," jelasnya.

Sekalipun ia menyadari, untuk membangun embung tidak cukup bila hanya mengandalkan dana APBD. Untuk itu Cakra meminta Dispartan agar bisa mencari solusi dana tambahan baik APBD provinsi maupun APBN.

"Kalau niatnya memajukan produktivitas pertanian ya harus bisa. Harus ada keberanian juga dari Pemkab Cirebon untuk berkomunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," tegas Cakra.

Kedua, pembangunan irigasi

tersier dinilai belum klimaks. Bahkan, kata Cakra, Dispartan belum memiliki data lengkap soal jumlah dan luas irigasi tersier yang ada. Padahal tersier sangat bermanfaat untuk produksi tanaman maupun penanggulangan banjir.

Karena itu, Cakra menekankan pentingnya data tersebut untuk melakukan pemetaan dan pembangunan irigasi tersier. "Persoalannya Dispartan mencatat tidak? Di dalam peta desa, harusnya ada saluran cacing," katanya

Ketiga, perlu ada Perda Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) demi melindungi petani dan terjaminnya hak atas pangan bagi seluruh rakyat sebagai kelanjutan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

"Ketersediaan pangan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon di masa mendatang masih belum terjamin. Untuk itu sebisa mungkin Dispartan mempertahankan jumlah lahan pertanian yang ada. Caranya dengan memperketat regulasi agar tak mudah dialih-

fungsikan," jelasnya.

Pasalnya, alih fungsi lahan akan mendorong petani kehilangan pekerjaannya. Apalagi jika petani tidak memiliki *skill* lain, kebijakan tersebut berpotensi menjadi ajang pemiskinan masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, juga menyinggung perlunya pembangunan waduk untuk mengatasi masalah krisis air pertanian.

"Saya sering berdiskusi dengan *stakeholder* tentang kondisi Cirebon timur. Masalahnya satu. Soal air. Lahan pertanian hanya satu kali panen. Tahun 2007 sudah dibuat kajiannya tentang waduk Cipanundang, namun sampai hari ini hanya menjadi kajian," ujarnya.

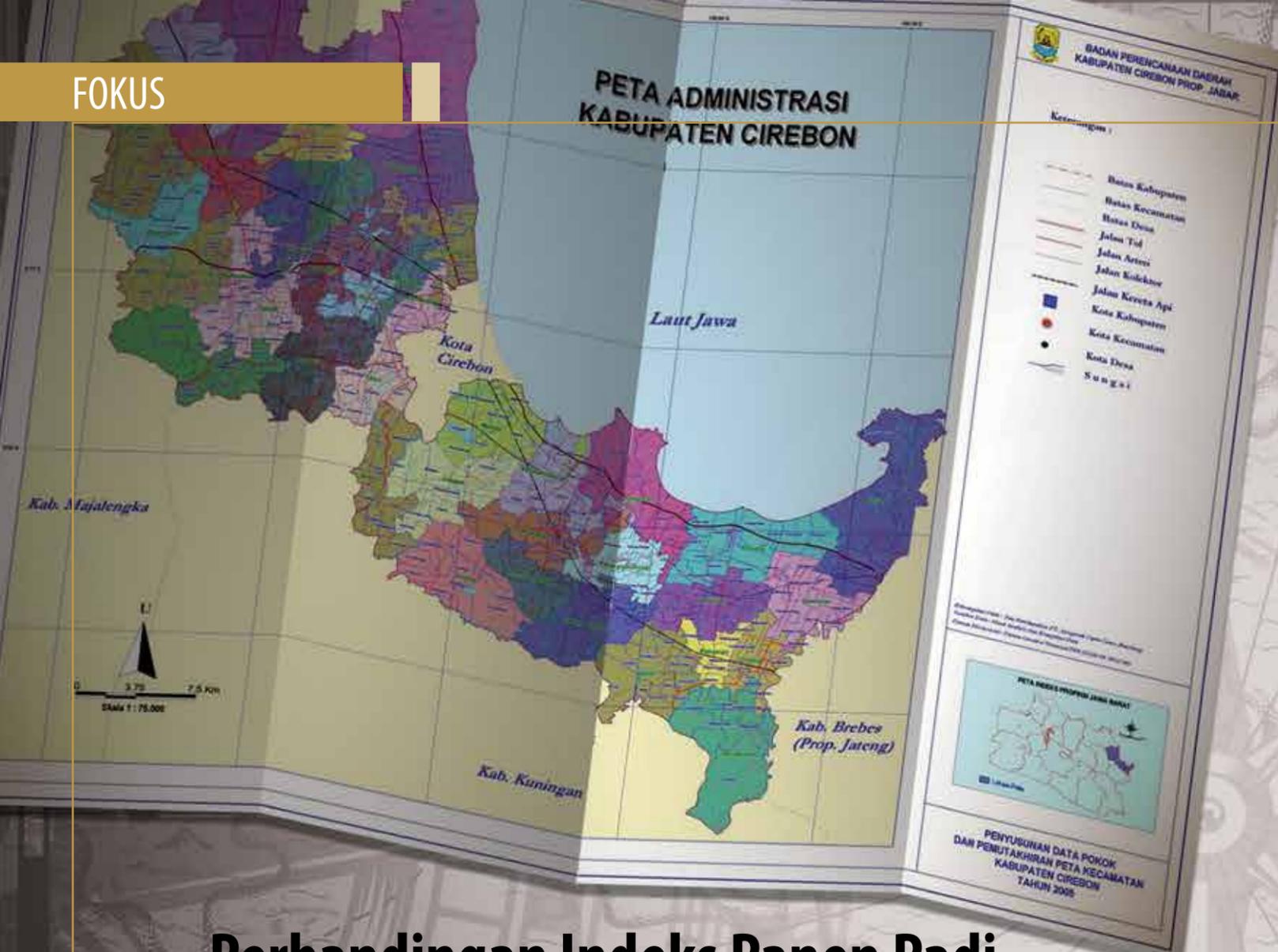
Selain itu, tak kalah penting teknologisasi produksi pertanian agar mampu menghemat biaya produksi namun dengan hasil panen melimpah.

"Sekarang bagaimana ceritanya kita bisa bersaing dengan Vietnam yang biaya produksi gabah hanya Rp 2.700 rupiah, sementara kita Rp 4 ribu rupiah. Kapan kita bisa bersaingnya?" tanya Luthfi.

Ia pun mengaitkan, kondisi ekonomi dunia saat ini yang menuntut pertanian mampu lebih produktif. Karena itu, jangan sampai Kabupaten Cirebon yang memiliki daerah agraris, namun produktifitas pertaniannya turun karena biaya produksi mahal.

"Hari ini revolusi industri telah mencapai 4.0, kalau kita berbicara produktifitas pertanian, boleh dong kita memakai revolusi industri 1.0 dulu. Mengganti tangan manusia menjadi mesin. Kalau produktifitas pertaniannya turun dan biaya produksinya mahal, kita tidak akan pernah bisa bersaing," ungkapnya.

•Muiz/Suf



## Perbandingan Indeks Panen Padi

No	Kecamatan	2019			2020		
		Luas 2018	Realisasi Panen	IP (Indeks Panen)	Luas 2019	Realisasi Panen	IP (Indeks Panen)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waled	1.786	2.060	115,34	1.786	2.064	115,57
2	Pasaleman	920	120	13,04	920	155	16,85
3	Ciledug	697	908	130,27	697	893	128,12
4	Pabuaran	518	772	149,03	518	767	148,07
5	Losari	1.436	1.215	84,61	1.436	1.555	108,29
6	Pabedilan	1.687	1.706	101,13	1.677	1.668	99,46
7	Babakan	1.450	1.653	114,00	1.450	1.693	116,76
8	Gebang	1.705	1.446	84,81	1.705	1.633	95,78

9	Karangsembung	1.310	1.118	85,34	1.310	1.312	100,15
10	Karangwareng	1.047	1.592	152,05	1.047	1.670	159,50
11	Lemahabang	971	1.033	106,39	971	936	96,40
12	Susukan Lebak	1.352	2.095	154,96	1.352	2.139	158,21
13	Sedong	1.265	2.634	208,22	1.265	2.805	221,74
14	Astanajapura	1.392	1.489	106,97	1.392	1.400	100,57
15	Pangenan	1.170	1.144	97,78	1.170	1.205	102,99
16	Mundu	911	1.478	162,24	911	1.755	192,65
17	Beber	1.059	1.538	145,23	1.059	1.735	163,83
18	Greged	839	1.465	174,61	839	1.705	203,22
19	Talun	689	1.214	176,20	689	1.270	184,33
20	Sumber	839	1.621	193,21	839	1.744	207,87
21	Dukupuntang	1.261	3.165	250,99	1.261	3.603	285,73
22	Palimanan	999	2.269	227,13	999	2.408	241,04
23	Gempol	985	1.930	195,94	985	2.002	203,25
24	Plumbon	671	1.474	219,67	670	1.581	235,97
25	Depok	644	1.514	235,09	644	1.513	234,94
26	Weru	231	444	192,21	230	445	193,48
27	Plered	680	1.171	172,21	680	1.309	192,50
28	Kedawung	116	194	167,24	116	230	198,28
29	Tengah Tani	464	839	180,82	464	921	198,49
30	Gunung Jati	975	1.014	104,00	975	1.487	152,51
31	Kapetakan	3.000	5.551	185,03	3.000	6.000	200,00
32	Suranenggala	1.550	2.299	148,32	1.550	2.742	176,90
33	Klangenan	1.479	3.024	204,46	1.479	3.032	205,00
34	Jamblang	1.167	2.487	213,11	1.167	2.437	208,83
35	Arjawinangun	1.383	2.777	200,80	1.383	2.791	201,81
36	Panguragan	1.686	3.351	198,75	1.686	3.372	200,00
37	Ciwaringin	1.146	2.141	186,82	1.146	2.312	201,75
38	Susukan	3.656	7.340	200,77	3.656	7.372	201,64
39	Gegesik	5.223	10.429	199,67	5.223	10.446	200,00
40	Kaliwedi	2.232	4.414	197,76	2.232	4.464	200,00
<b>Jumlah</b>		<b>52.591</b>	<b>86.128</b>	<b>163,77</b>	<b>52.579</b>	<b>90.571</b>	<b>172,26</b>

# Empat Program Agar Pertanian Maju

Agar hasil pertanian terus meningkat dan petani menjadi makmur, Dinas Peternakan dan Pertanian telah menyiapkan sedikitnya empat program unggulan. Apa saja?



Foto: foto: Quany/dk

Peringkat sumbangsih produksi pertanian pada sektor beras Kabupaten Cirebon menempati nomor 7 di Jawa Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar menunjukkan, produksi padi Kabupaten Cirebon pada 2020 sebesar 480.525 ton padi gabah kering giling (GKG) atau sebanyak 276.065 ton beras dari luas lahan 90.778 hektare. Kondisi demikian membuat produksi beras Kabupaten Cirebon pada 2020 kembali surplus.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Cirebon Wasman me-

laporkan, pada 2020 Kabupaten Cirebon mengalami surplus beras hingga 102 ton. Jumlah tersebut, didapat dari seluruh produksi beras sebanyak 372 ribu ton dengan konsumsi beras 2,2 juta per kapita atau rata-rata sebesar 115 kg atau 3 ons sehari.

Dispertan pun optimistis produksi beras pada 2021 akan kembali surplus. Sebab menurutnya, cuaca yang cukup baik pada tahun ini, akan menguntungkan kondisi pertanian di Kabupaten Cirebon. Meskipun, ada beberapa daerah yang harus ditanam ulang akibat terendam banjir.

Wasman pun bertekad, akan

memaksimalkan hasil pertanian padi di Kabupaten Cirebon. Ia menargetkan pada 2024 nanti, luas lahan pertanian Kabupaten Cirebon bisa meningkat hingga 110 ribu hektare. Langkah konkretnya Dispertan berencana menjalankan sedikitnya empat program strategis tahun 2022-2024.

Keempat program tersebut, diantaranya, Dispertan akan memberikan benih unggul varietas padi bersertifikat, untuk 40 hektar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Para petani akan mendapatkan jatah benih unggul tersebut sebanyak 25 kg per hektare.



Sementara ini, lahan produksi benih unggul bersertifikat milik Dispertan tercatat baru seluas 17 hektar. Dengan menghasilkan 5 ton benih per hektare. Hasil tersebut dirasa masih kurang dari target kebutuhan 40 hektare LP2B.

“Sementara ini pemberian benih unggul bersertifikat dilakukan secara bertahap. Tergantung ketersediaan luas lahan untuk benih dan anggaran daerahnya,” jelas Wasmin.

Kedua, Dispertan juga akan memaksimalkan penyerapan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan sarana pendukung bagi petani. Salah satunya akses jalan usaha tani.

Menurut Wasman, saat ini jalan usaha tani sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pertanian. Diantaranya, agar ada penambahan lahan dengan membuka lahan kosong atau pun supaya hasil pertanian bisa lebih mudah untuk dipasarkan ke desa atau kota.

“Pembangunan jalan usaha tani akan memudahkan para petani mengakses lahan. Sebab petani bisa mengangkut hasil budidaya untuk dipasarkan di desa atau kota menggunakan mobil. Kalau menggunakan motor kan membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal,” ungkapnya.

Ketiga, Dispertan akan memaksimalkan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 14 miliar

per tahun, untuk pembangunan irigasi tersier dengan target 180 paket. Menurutnya, pembangunan irigasi tersier penting guna melancarkan pengairan ke sawah. Sehingga mendukung optimalisasi produktivitas tanaman.

Dispertan mengklaim kerusakan irigasi tersier di Kabupaten Cirebon saat ini mencapai 60 persen. Namun diakuinya, belum ditemukan secara keseluruhan total luas irigasi tersier yang rusak.

“Sekarang kita masih mendata jumlah luasan irigasi tersier yang rusak. Nanti diperoleh data keseluruhan jumlah irigasi tersier yang masih baik dan yang sudah rusak. Tetapi di Rencana Strategis program perangkat daerah tahun 2022-2024 sudah masuk sebesar 60 persen irigasi tersier mengalami kerusakan,” jelasnya.

Selain itu, Dispertan akan mengencangkan sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berbentuk perlindungan bagi para petani.

Wasman mengatakan, AUTP dimaksudkan untuk melindungi petani yang mengalami gagal panen akibat banjir, kekeringan dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Lewat AUTP, petani yang mengalami gagal panen akan mendapatkan modal kerja sebesar Rp 6 juta dengan mekanisme klaim asuransi.

Wasman berharap nantinya, kondisi gagal panen tidak lagi menjadi momok menakutkan bagi petani di Kabupaten Cirebon. Sebab melalui asuransi pertanian ini, kerugian gagal panen tidak lagi ditanggung sendiri.

“Biaya produksi pertanian sampai panen kan sekitar Rp 7 juta. Ketika di pertengahan produksi mengalami gagal panen, petani akan menadapatkan asuransi sebesar Rp 6 juta. Hanya 10 persen ruginya,” katanya. •**Muiz**

## Belajar dari Cilacap dan Sumedang Dongkrak Masa Tanam dan Teknologi Perairan

Mampu dongkrak masa tanam hingga tiga kali dengan menghemat air. Bahkan kota-kota ini mampu genjot sektor pertanian yang diminati pemuda. Seperti apa?



Foto: Quasyda

Sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang mampu eksis pada krisis apapun bagi Kabupaten Cirebon. Terbukti geliat pertumbuhannya tetap menjadi tulang punggung ekonomi tertinggi kedua sekalipun di masa pandemi. Namun pencapaian itu tak berbanding lurus dengan harapan petani. Sebagian wilayah di Kabupaten Cirebon hanya mampu melakukan masa tanam dengan rerata dua kali.

“Jika dilihat dari jenis tanah, Kabupaten Cirebon itu sangat potensial melakukan masa tanam dan panen 3 kali. Namun

karena saluran irigasi yang buruk sehingga tak ada air cadangan. Jadi para petani hanya menanam ketika musim hujan saja,” ujar Akademisi ilmu pertanian Universitas Gunung Jati Cirebon Deden Sp, Mp.

Selain itu, potensi lainnya, kata Deden, jika dilihat dari serangan hama dan organisme pengganggu tanaman (OPT), pertanian di Kabupaten Cirebon tidak terlalu mengkhawatirkan. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana para petani dapat menanam sepanjang tahun dengan tidak kekurangan air.

“Saya pernah sesekali berjalan

dengan kelompok pertanian di wilayah Pangenan dan Kanci. Saya melihat saluran air bercampur dengan limbah pabrik. Itu kan ngeri sekali,” paparnya.

Untuk itu, gagasan pembuatan embung bisa menjadi solusi agar cadangan air untuk sawah tetap ada. Namun Deden bilang, pembuatan embung harus diperhatikan agar pembagian air bisa merata dari hulu hingga ke hilir.

Deden juga menilai, harga pupuk yang selalu naik tiap tahunnya menjadi penyebab produktifitas pertanian tak capai hasil merata. Sementara pupuk jenis subsidi dari pemerintah pu-



Deden Sp, Mp. (Dosen Pertanian Universitas Gunung Jati Cirebon)



sat jumlahnya terbatas. Sehingga para petani mau tidak mau harus membeli pupuk non subsidi dengan pautan harga yang fantastis.

“Fenomena demikian sangat konkret terjadi di petani. Belum lagi, petani harus mikirin modal jika sedang paceklik. Akhirnya terpaksa menggadaikan agunan ke tengkulak dengan tenor pasca panen,” ujarnya.

Oleh karena itu, Deden berpendapat, perlunya bantuan permodalan bagi para petani dengan pembuatan semacam koperasi untuk pinjaman dengan tempo kondisional.

“Misalkan petani meminjam di bank itu harus membayar tiga bulan maka tenornya tiga kali panen,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan beberapa kota yang telah sukses dan maju dalam bidang pertanian. Sebagian kota itu, bahkan telah menyulap lahan pertanian menjadi tempat wisata.

“Coba kita lihat saja di Malang. Di sana pengembangan potensinya sangat luar biasa, mereka menyulap pertanian menjadi tempat wisata. Di Bandung juga sudah maju, sistem pertanian mereka sudah cukup baik. Terus perairannya juga sangat baik,” katanya.

### Lumbung Pangan Nasional

Selain sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah, Cilacap juga merupakan salah satu lumbung

pangan di provinsi maupun nasional karena produksi padinya yang tergolong tinggi.

Bahkan, pada 2020 Kabupaten Cilacap berhasil menempati peringkat kedelapan produsen beras terbesar di Indonesia dengan luas panen 117.628 hektare, petani setempat mampu menghasilkan 793.907 ton gabah atau setara 455.464 ton beras.

Meski ekonomi dunia secara umum menurun drastis di masa pandemi akibat penerapan pembatasan kerumunan, namun sektor pertanian di Kabupaten Cilacap tetap mampu bertahan. Bahkan gabah kering di Cilacap dinyatakan surplus.

Indikatornya adalah berdasarkan data rilis Kementerian Pertanian, hasil pertanian Kabupaten Cilacap masuk dalam urutan 10 besar tahun 2020 lalu. Sehingga menjadi salah satu daerah penyangga pangan Nasional. Bahkan untuk ditingkat Provinsi Jawa Tengah, berhasil menempati posisi ketiga.

Kualitas panennya pun dinilai masih cukup baik dan di atas rata-rata. Yakni dengan dibuktikan dari setiap satu hektar lahan pertanian yang mampu menghasilkan 8 ton gabah kering.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus berupaya meningkatkan kapasitas SDM pertanian di Kabupaten Cilacap dengan program 1 juta petani muda.

Para petani secara rutin mendapatkan pembinaan yang diberikan oleh petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam rangka peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

Melalui pertemuan rutin dan pembinaan tersebut. Berbagai informasi pertanian dapat langsung diterima dan dipahami oleh petani.



Alhasil, tingkat kesejahteraan petani juga tergolong cukup baik. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dalam peningkatan kapasitas SDM petani, terus berupaya memunculkan petani milenial.

Mereka terus mendorong anak-anak muda untuk minat bertani. Dengan demikian, anak-anak muda turun ke sawah dengan sendirinya setelah mereka mencintai pertanian, sehingga keberadaan petani tetap lestari dan produktivitas pertanian yang tinggi dapat tetap dipertahankan.

Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap juga berkomitmen untuk mempertahankan lahan sawah seluas 58.000 hektare untuk ketahanan pangan provinsi maupun nasional.

**Teknologi Pengelolaan Air**

Petani Desa Kebon Cau, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten

Sumedang, Jawa Barat telah menikmati hasil panen padi yang ditanam pada Musim Tanam (MT) ke-3. Panen padi ini berkat penerapan teknologi pengelolaan air dalam kegiatan peningkatan indeks pertanaman yang didiseminasikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat.

Dengan sumber air Sungai Cimanuk sejauh 1 kilometer dari hamparan sawah, BPTP dan Dinas membantu pembangunan saluran air permanen. Pembangunan saluran air menggunakan sistem pompanisasi ke sawah milik petani seluas 13 hektare. Hasilnya, mereka bisa menanam padi sebanyak 3 kali.

Teknologi yang diterapkan yaitu sistem irigasi air permukaan dengan menaikkan air dari sungai menggunakan pompa dan pipanisasi, serta sistem budidaya

padi sawah tadah hujan hemat air berbasis organik (Patbo Super).

Manfaatnya, teknologi Patbo Super ini menitikberatkan pada pentingnya budidaya padi yang menghemat air hingga 75 persen.

Teknologi Patbo Super menggunakan varietas unggul baru (VUB) kelompok amfibi, bahan organik, alsintan (alat mesin pertanian), pengendalian gulma, serta pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman) ramah lingkungan.

Pengairan hemat air dipantau melalui alat pengukur air. Varietas yang didiseminasikan adalah Inpari 30, Inpari 33, Inpari 39, Inpari 42 dan Inpago 9. Produksi padi yang diperoleh lebih baik dibandingkan musim tanam sebelumnya (MT II) yaitu 6,14 ton/ha Inpari 33; 4,5 ton/ha Inpari 39; 7,4 ton/ha Inpari 42; dan 3,28 ton/ha Inpago 9.

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

# Tinjau Program Vaksinasi Massal

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon bersama Forkopimda meninjau langsung program vaksinasi massal di RS Sumber Hurip. Mereka pun mengundang para pengemudi ojek online (ojol).



Foto-foto : Qusoy/ik

# Setwan Ikuti Laga Tenis Meja

Tim sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon mengikuti ajang turnamen tenis meja yang diadakan BNN Kota Cirebon. Perlombaan itu dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2021.



Foto : dok setwan

## Keluhan Biaya Operasional Wisata Cikuya



Salam hormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten. Kami dari pengelola tempat wisata Cikuya, Belawa, Kecamatan Lemahabang. Seperti diketahui, kami sedang membudidayakan kura-kura asli dari Kabupaten Cirebon, namun kami memiliki kendala untuk memberikan makan satwa di sini karena terkendala biaya operasional. Pada akhirnya, kami sering kali meminjam untuk memberikan makan satwa. Selain itu, kami juga kekurangan lahan untuk kolam indukan, karena kolam yang ada, sudah tidak lagi cukup untuk menampung 300 lebih jumlah kura-kura Belawa.

Semoga masukan saya ini mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

**Pengelola Wisata Cikuya, Belawa, Kecamatan Lemahabang.**



## Perlu Pembatas Semburan Belerang

Assalamu'alaikum wr wb

Yang terhormat Bapak/Ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Marto (60) warga Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang. Belakangan ini kembali ramai dengan adanya pemberitaan mengenai semburan lumpur bercampur bau belerang di Blok Cisaat Desa Cipanas. Walaupun sudah sejak lama semburan itu ada, namun baru sekarang ini ramai. Pengunjung dari luar daerah pun ramai-ramai datang untuk melihat. Jadi demi meminimalisasi hal-hal yang tidak diinginkan, kami berharap agar ada pembatas yang lebih kokoh, tidak hanya tulisan dan tali saja.

Semoga masukan saya ini mendapat perhatian dari pemerintah. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

**Marto (60), Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang.**

## Sungai Singaraja Perlu Normalisasi

Assalamu'alaikum wr wb

Bapak/Ibu Dewan yang saya hormati.

Saya Ruhiyat, warga asli Desa Japura bakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Saya ingin melaporkan kalau di desa saya saat musim hujan seperti ini seringkali mengalami banjir. Saya merasa ini perlu segera ada penanganan khusus untuk membongkar akar permasalahan yang selama ini terjadi. Ini sudah langganan dari tahun ke tahun.

Mohon kiranya Bapak/Ibu Dewan segera mengambil tindakan bersama dinas PUPR untuk membenahi Sungai Singaraja, agar keluhan yang saya dan masyarakat di sini alami dapat ditindaklanjuti.

Terimakasih. Wassalamu'alaikum. Wr. Wb  
**Ruhiyat (41)/Petani**



## Warga Mengeluh Praktik Togel



Assalamu'alaikum Wr Wb

Bapak/Ibu Dewan yang saya hormati.

Saya Dasiman (nama samaran) asal Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Saya ingin menyampaikan keresahan yang sedang dialami di daerah saya. Akhir-akhir ini di desa saya sedang marak praktik judi seperti: Toto Gelap (Togel) di kalangan anak muda hingga yang tua. Saya perlu kasus ini segera ditindaklanjuti, terutama masalah tersebut bisa merusak generasi anak bangsa kita. Sebenarnya kasak-kusuk seperti ini sudah terjadi lama namun tidak pernah ada tindakan khusus baik dari pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah untuk memitigasi.

Mohon kiranya Bapak/Ibu Dewan bisa segera memperhatikan masalah ini, agar masyarakat di sini terbebas dari praktik judi semacam itu.

Terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr Wb.  
**Dasiman (32)/Buruh**

## Chocobond Coklat Gurih Hingga Pedas

Unik, kudapan Chocobond ini terbuat dari cokelat dibaluri tempe hingga cabe. Seperti apa?



Foto: foto - Quasy/ik

Sebagai bagian wilayah yang memiliki banyak kuliner, Kabupaten Cirebon ternyata memiliki aneka makanan khas daerah, ada beberapa produk, salah satunya Chocobond yang patut dicoba.

Chocobond atau *cokelate wong cirebon* itu merupakan kudapan manis terbuat dari cokelat dengan dibalut berbagai jenis makanan.

“Cokelat dibaluri emping, intip, tempe hingga berbagai varian rasa lainnya,” ujar Asep Rukmana, pemilik Chocobond.

Asep yang merupakan penggagas Chocobond mengaku, kalau awalnya ia hanya iseng membuatnya. Tepatnya pada tahun 2017, Asep pernah terpikirkan untuk memadukan konsep makanan tradisional dengan modern. Ia pun mencari caranya. Namun saat itu, ia tidak begitu fokus karena masih disibukkan dengan pekerjaannya sebagai kontraktor.

“Baru ketika tahun 2019 akhirnya saya memutuskan untuk fokus menggarap ide itu yang sempat berhenti,” ujarnya.

Laki-laki berdarah Garut itu mengaku, kalau ia terinspirasi membuat Chocobond setelah ada pro-

duk Chocodot, cokelat dengan isi Dodolgarut. Ia pun mencoba untuk mentransfernya dengan menggabungkan cokelat dengan makanan khas Cirebon seperti emping dan intip.

“Ternyata setelah jadi, rasanya enak. Saya pun coba untuk menggeluti serius. Kalau produk unggulan yang saya buat ada emping, intip dan tempe. Ada juga yang dari buah mangga, stroberi, *green tea* dan yang terakhir cokelat pedas. Itu terbuat dari campuran cokelat dan cabe halus,” jelasnya.

Untuk mendapatkan bahan-bahan itu, Asep tak bersusah payah karena telah bekerjasama dengan sesama UMKM. Pola seperti ini ia gunakan agar saling menguntungkan sesama pelaku usaha.

Sementara untuk membuat Chocobond, ia masih mengandalkan cara tradisional. Ia pun memiliki 4 orang karyawan non tetap yang dipekerjakan jika sedang dibanjiri pesanan.

“Karena mesin produksi harganya sangat mahal, jadi kita belum punya. Kita masih gunakan tangan manusia. Kalau lagi *bludak* pesanan, adek dan istri saya juga ikut membantu mengemas Chocobond,” ungkapnya.



Dalam membangun bisnisnya, Asep Rukmana tak serta merta memiliki jalan yang mulus begitu saja. Ia banyak mengalami tantangan yang harus dihadapi, apalagi sebelumnya ia juga belum pernah memiliki pengalaman berwirausaha. Asep memutar otaknya agar Chocobond ini bisa eksis dan diterima masyarakat.

Hingga akhirnya, ia pun bergabung dengan forum UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM serta Diperdagin. Asep

pun dilatih bagaimana mengemas dan memasarkan Chocobond miliknya.

“Semenjak bergabung, saya jadi tahu caranya. Dinas sering membuat pelatihan bagaimana memasarkan melalui online seperti *market place*. Jadi tidak hanya mengandalkan berjualan langsung saja,” ujarnya.

Kini, Asep pun memiliki kanal website maupun sosmed untuk memasarkan Chocobond sendiri.

“Kita punya website *www.chocobond.com* bisa pesen di situ.

Kita juga tersedia *market place* shoppe, tokopedia ataupun sosial media lainnya,” ucapnya.

Berkat ia memiliki kanal online, Asep mengaku produknya telah laku hingga ke luar pulau. Ia telah mengirim Chocobond ke Jakarta, Sumatra hingga Bali.

“Alhamdulillah kalau lagi ramai, keuntungan 1 bulan saya bisa mengantongi Rp 4 sampai 5 juta. Apalagi dalam kemasan tersebut saya mengangkat khas daerah, nanti kita akan buat *tagline* menjadi Chocobond ini Cokelatku,” terangnya.

Produknya pun telah menerima respon yang baik dari konsumen. Itu terbukti saat ia mengikuti program Perijinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diselenggarakan dinas.

“Produk Chocobond sangat direspon baik oleh pengunjung dan dinas. Bahkan kita didapuk sebagai ikon kudapan baru khas Cirebon. Tahun ini kita juga diberi kesempatan ikut program *Comperhensif Industrial Choacing* (CIC) angkatan 3 dari Diperdagin,” jelasnya.

Untuk mencicipi Chocobond, pengunjung bisa datang langsung ke rumah Asep yang berada di Desa Kalisapu, Gunungjati, Kabupaten Cirebon ataupun bisa memesannya melalui kanal website.

Pengunjung pun tak perlu khawatir akan merogoh kantong lebih dalam karena harganya yang sangat terjangkau. Mulai ukuran paling kecil 35 gram dibandrol seharga Rp 5 ribu sementara ukuran 100 gram Rp 20 hingga 25 ribu.

“Sekarang kita lagi fokus berinovasi lagi untuk memadukan cokelat dengan bahan lainnya. Kita juga tengah mengejar agar dapat legalitas dari BPOM lebih dulu,” pungkas Asep. • Lan

## Menilik Pengrajin Perahu Jukung

Tangannya tak berhenti mengampelas kayu jati yang telah ia potong. Matanya menatap tajam ke arah meteran, sekadar memastikan ukurannya sesuai.

Desakan perahu Modern tak membuat ia gentar untuk tetap memproduksi perahu tradisional.

"Kalau pembuatan perahu, waktunya bisa 3-4 bulan untuk ukuran 11 meter dengan lebar 2.6 meter," ungkap Sidul, salah satu pengrajin perahu tradisional di Kecamatan Gebang.

Sejak 30 tahun lalu, usaha ini telah Sidul geluti. Dengan beberapa rekannya, Sidul telah memproduksi puluhan perahu untuk nelayan pergi berlaut.

Sidul mematok harga per unitnya Rp 50-80 juta. Tergantung kualitas dan bahan ukuran yang diinginkan.

Kini, kurang dari 30 pengrajin perahu saja yang tersisa di Kecamatan Gebang.

"Kita tidak ada kerjaan lagi selain bikin perahu," katanya. •Soy



## Suryanti

# Pilih Hidup Mandiri Pada Usia Muda

Kesuksesan lahir dari orang yang mau belajar dan berani mengambil sikap untuk hidup mandiri. Seperti sosok satu ini. Bagaimana kisahnya?

Berbahagiailah mereka yang makan dari keringatnya, bersuka karena usahanya dan maju karena pengalamannya sendiri. Ungkapan Pram di atas layak jika disematkan untuk perempuan satu ini. Pasalnya, semenjak kecil hingga sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon, ia tergolong perempuan yang sangat mandiri.

Perempuan itu bernama Suryanti, lahir di Desa Pekantingan, Kecamatan Klagenan, Kabupaten Cirebon. Suryanti bukanlah orang yang lahir dari keluarga berekonomi tinggi. Orangtuanya hanya seorang pedagang yang merantau di luar kota.

“Jadi memang dari kecil karena orangtua merantau, saya hidup hanya ditemani saudara. Makanya sudah terbiasa apa-apa itu sendiri,” jelas Suryanti.

Namun dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, tak membuat Suryanti berhenti untuk merengkuh pendidikan tinggi. Pendidikan baginya menjadi nomor utama. Semasa kecil, ia adalah siswi yang sangat pandai. Terbukti ia selalu menjadi perwakilan dari sekolahnya mengikuti lomba cerdas cermat.

Foto: foto : Quesoy/ik



“Saya dulu sekolah di SD Pekantingan. Setiap ada Porseni saya sering mengikuti lomba cerdas cermat bersama 2 teman saya dan meraih juara 1 dan 2,” terangnya.

Pasca lulus SD, Suryanti pun melanjutkan sekolahnya di SMP 2 Klagenan dan mulai terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

“Saya pernah ikut Palang Merah Remaja (PMR) karena tertarik. Tapi kalau SMA saya hanya ikut pencak silat. Karena di SMA dulu, selesai sekolah sampai pukul 12, jadi enggak bisa ikut banyak karena ada pengayaan,” ungkapnya.

Setamat SMA, Suryanti tidak langsung melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ia berhenti selama 2 tahun untuk bekerja demi menabung agar bisa mewujudkan cita-citanya berkuliah. Ia hanya ingin melanjutkan pendidikannya dengan biaya sendiri.

“Pada saat itu saya tidak mau menjadi beban orangtua, setelah lulus sekolah saya memutuskan untuk tidak bergantung lagi. Saya mencari uang dan alhamdulillah saya bisa kuliah di STIKOM dengan mengambil jurusan akuntansi,” ungkapnya.

Semasa kuliah, Suryanti tidak pernah mengikuti kegiatan apapun, ia hanya fokus agar kuliahnya bisa cepat selesai dan dapat bekerja nantinya.

“Karena melihat usia orang tua yang semakin menua, saya sudah tak tega jika melihat mereka masih bekerja,” jelasnya.

Ia pun mulai kuliah dengan serius hingga lulus tahun 2007. Suryanti langsung mencari pekerjaan dengan merantau di Kabupaten Subang.

“Saya langsung mendapat kontrak pekerjaan di Subang selama 1 tahun. Orangtua pun akhirnya berhenti bekerja, dan saya mencoba menggantikannya. Tahun kedua saya pindah bekerja di Kuningan. Baru akhirnya saya mendapatkan pekerjaan di Cirebon,” katanya.

Suryanti memiliki prinsip hidup sedari kecil, agar tidak terbiasa menyusahkan orang lain. Selagi bisa, ia akan memilih mengerjakan sesuatu tanpa meminta bantuan siapa pun. Hidup mandiri telah mendarah dalam jiwanya.

Nasib tak ada yang tahu, tepat tahun 2019 Suryanti mulai dilirik agar ikut serta dalam kontestasi politik. Suryanti pun memilih bergabung bersama Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan memberanikan diri maju pada pemilihan legislatif di tahun yang sama.

“Awalnya saya tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD. Apalagi dari segi pengalaman dalam dunia politik pun dirasa masih sangat kurang. Keinginan



itu hadir saat baru ada pembukaan pencalonan, saya merasa perlu untuk ikut andil dalam membantu masyarakat,” jelasnya.

Awalnya ia tidak menyangka jika akan didapuk dan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Baginya politik merupakan hal baru di hidupnya. Kini ia berada di puncak kesuksesan sebagai pemangku kebijakan.

“Berada di posisi sekarang, saya akan terus bersyukur. Meski pada tahap pencalonan dulu hanya seadanya, namun garis takdir Tuhanlah yang membuat saya akan belajar tentang bagaimana mengemban amanah dan membantu masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab besar yang sedang saya pikul,” pungkasnya. •Lan

## Cakra Suseno

# Sempat Miliki Cita-Cita Jadi Pembalap

Sempat bercita-cita menjadi pembalap motor namun orangtuanya tak merestui. Cakra pun memilih menjadi pengusaha. Bagaimana kisahnya?



Foto: foto - Quasy/Id

Karir politik merupakan takdir atau garis tangan Tuhan. Begitu ungkap sosok pria satu ini, saat mengenang awal mula perjalanannya menjadi seorang politikus. Sosok lelaki berbadan tegap ini adalah anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang berasal dari Fraksi Gerindra. Semasa SMA, lelaki bernama lengkap Cakra Suseno ini telah banyak belajar mengenai ilmu sistem pemerintahan dan poli-

tik. Awal karirnya ia mulai saat bekerja di kantor pemerintahan Desa Astanajapura dengan menjabat sebagai Kepala Urusan (KU) selama dua tahun sejak 2001 silam. "Setamat SMA saya mengemban pendidikan perguruan tinggi sambil bekerja, saya dipercaya oleh kuwu untuk membantu beliau," terang Cakra. Selepas masa jabatannya menjadi perangkat desa, Cakra memutuskan untuk putar haluan

mengikuti jejak saudaranya berwirausaha. Ia memiliki prinsip, ketika ada kesempatan dan peluang menguntungkan maka akan ia gunakan sebaik mungkin. Baginya, kesempatan berwirausaha tidak datang dua kali. Terlebih, ia juga meminati bidang tersebut. Ia pun melakoni berbagai macam usaha. "Mengawali itu, tahun 2003 saya sudah banyak malang melintang. Mulai dari menjadi buruh, pedagang



dan hampir semua bidang usaha saya coba," katanya.

Namun atas dorongan masyarakat, sepuluh tahun kemudian ia memutuskan untuk kembali ke gelanggang politik. Mewarisi kepercayaan masyarakat kepada sang kakaknya yang dulu duduk di kursi parlemen periode 2009-2014. Ia pun masuk ke Partai Gerindra untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif periode 2014-2019.

"Sebenarnya saya ragu dan kurang meminati, tetapi karena dorongan dan panggilan masyarakat akhirnya saya mau. Mereka berharap dan ingin terwakilkan oleh saya di dapil Astanajapura," ungkapnya.

Pertama kalinya Cakra mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, ia tidak bisa menikmati waktu tidurnya dengan nyenyak. Selama tiga bulan, kekhawatirannya selalu muncul jika ia terpilih dan tidak bisa memegang amanah besar tersebut.

Kemantapan Cakra akhirnya datang seusai mendengar nasihat Ketua DPD Partai Gerindra H Subhan. Teringat jelas dalam benaknya, ia bercerita, bahwa

H Subhan mengatakan semua pekerjaan tidak ada yang enak. Tetapi jika memiliki niat untuk membantu masyarakat, jalannya pasti akan mudah.

"Memang saat itu yang memacu semangat saya menjadi dewan adalah H Subhan. Berkat beliau, suara saya bisa terdengar. Artinya kalau saya orang biasa, suara saya tidak akan didengar saat meminta bantuan untuk masyarakat ke pemerintah," ucapnya menegaskan.

Seiring berjalannya waktu, ia selalu belajar tentang pemerintahan dan politik. Bahkan ia pun kembali dipercaya masyarakat pada periode kedua saat ini. Meski begitu, Cakra menyadari masih banyak kekurangan. Kekurangan itulah yang ia jadikan sebagai evaluasinya agar bisa lebih baik lagi kedepan.

Cakra tetap melanjutkan berwirausaha sekalipun ia menjadi pemangku kebijakan. Baginya menjadi seorang anggota dewan bukan merupakan mata pencaharian. Ia pun meneruskan bisnis dan usaha tambak, lahan pertanian, kolam ikan lele, ternak ayam hingga berkebun.

"Kalau bisnis bukan hanya cari untung saja. Bisa memangkas dan mengurangi jumlah *cost* kebutuhan rumah tangga saja itu sudah termasuk bisnis. Makanya saya bikin perkebunan kecil untuk kebutuhan tersebut. Terkadang ada juga yang datang beli ikan," terangnya.

Selain menjalani perannya sebagai anggota dewan dan pengusaha, Cakra juga kerap mengisi aktivitas keseharian dengan berbagai hobinya. Ia sering berjalan kaki 5 sampai 7 kilometer sambil melihat pemandangan desa dan menyapa masyarakat. Ia juga hobi menonton liga pertandingan sepakbola dan bermain badminton.

Ia juga mengungkapkan kegumannya terhadap motor balap sejak SMA. Menurutnya, adrenalin menaiki motor balap baginya merupakan tantangan. Ia pun sempat memiliki cita-cita menjadi seorang pembalap.

"Dulu waktu belum punya anak saya juga suka ngebut-gebut. Saya senang motor, dulu cita-cita saya jadi pembalap, tapi yang ikut balapan jaket sama motornya aja. Karena gak boleh sama orang tua," kenangnya sambil terkekeh.

Namun, kalau dilakukan sekarang, Cakra mengaku tak akan berani jika harus balapan karena lalu lintas padat dan banyak pengguna yang tidak mengindahkan keselamatan. Sehingga balap motor hanya bisa dilancarkan di arena sirkuit.

"Kalau jiwa saya suka motor, GP, superbike, motor di aspal yang kecepatannya cukup tinggi. Dulu saya pengen banget punya Honda NSR 250. Sampai sekarang belum kesampaian, sekarang sudah seharga mobil dan memang adanya cuman di kolektor," katanya. •Sar

# Fraksi DPRD Beri Masukan RPJMD 2019-2024

Tujuh Fraksi DPRD memberi catatan dan mengevaluasi RPJMD 2019-2024. Sebagai besar mengenai kesejahteraan sosial.



foto: foto: Quany/dk

Bertempat di ruangan paripurna, DPRD Kabupaten Cirebon menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.

Rapat Paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohammad Luthfi, Bupati Cirebon Imron Rosyadi dan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih.

Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi membacakan pandangannya, yang berisi masukan dan kritik sebagai acuan dalam menentukan arah RPJMD 2019-2024.

Pertama, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyoroti pemda agar memperhatikan angka kemiskinan atau kesenjangan pendapatan akibat pandemi Covid-19 dan pembangunan infrastruktur wilayah yang belum merata.

Selain itu, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, Fraksi PKB mengimbau agar pemda dapat meningkatkan Sumber daya manusia yang lebih maju dan berdaya saing di pasar internasional. Fraksi PKB juga mengimbau agar dapat meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan teknologi dan informasi.

Kedua, Fraksi PDIP yang

menyampaikan 3 point yang diprioritaskan dalam perubahan RPJMD. Pertama, peningkatan infrastruktur dan tata ruang, peningkatan sumberdaya manusia dan pencapaian masyarakat yang aman dan tentram.

Sementara Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemda untuk tetap mempertimbangkan program-program yang sempat ditangguhkan agar dikaji kembali. Sebab, bisa jadi program tersebut menjadi prioritas pada tahun 2021 sebagai program pemulihan dampak pandemi Covid-19.

Mereka juga menyebutkan, salah satunya ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, rutilahu,



peningkatan kapasitas SDM bidang pendidikan, serta jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Keempat, Fraksi Golkar yang mengimbau pemda untuk memperhatikan angka pengangguran dan kemiskinan yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan disebabkan, salah satunya alur perizinan pembangunan industri bagi investor yang dihadapkan pada prosedur yang panjang dan terhalang pungli.

Fraksi Partai Golkar juga menyoroti isu pemekaran Cirebon Timur yang sering diungkapkan Bupati melalui media massa. Fraksi Partai Golkar meminta agar dilakukan kajian yang lebih matang terkait wacana tersebut.

“Apakah isu tersebut sudah tertuang dalam perubahan RPJMD yang kita dengarkan? Kalau sudah, apa bentuk rill dari program yang akan direalisasikan guna mengatasi isu tersebut? Atau hanya simbolis saja?” tanyanya.

Selain itu Fraksi Golkar mengimbau agar pemda dapat memaksimalkan potensi sumber

daya daerah untuk pendapatan kas daerah. Ia mencontohkan potensi wisata alam, budaya, religi hingga kuliner.

Kelima, Fraksi Gerindra dalam penyampaiannya memberi masukan, perlunya perencanaan matang dalam implementasi dan merealisasikan target pembangunan daerah dalam waktu tiga tahun ke depan sebagaimana ditentukan. Selain itu, pentingnya peningkatan IPM. Sebab IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas SDM.

Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti dua hal. Pertama tentang meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. Padahal banyak pabrik yang sedang, dan akan berdiri di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, mereka juga menyoroti mengenai kesehatan. Menurut Fraksi PKS, besarnya anggaran kesehatan karena *re-focusing* APBD tahun 2021 seharusnya bisa lebih meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Mereka pun menanyakan, target urusan kesehatan apakah akan mampu meningkatkan secara signifikan.

Terakhir, giliran Partai Demokrat yang berharap RPJMD ini akan mampu atasi masalah pengangguran, membuat infrastruktur menjadi lebih baik, kesejahteraan masyarakat meningkat, pendidikan mudah dijangkau, pengelolaan lingkungan hidup seperti sampah bisa lebih efektif dan efisien, serta derajat kesehatan dan kebahagiaan warga masyarakat yang lebih terasa.

Rapat paripurna ini dihadiri pula oleh jajaran wakil ketua DPRD, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan Forkopimda.

•Muiz

# Tinjau Persiapan Pilwu Serentak

Pilwu serentak akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Tinggal menunggu Perbup diketok palu untuk aturan teknisnya.



foto-foto: Quasy/ik

Menjelang Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak di Kabupaten Cirebon pada November 2021 mendatang, kasus Covid 19 di Kabupaten Cirebon melonjak. Sebanyak 35 kecamatan di Kabupaten Cirebon masuk dalam zona merah atau berisiko tinggi dalam penyebaran pandemi. Tak terkecuali Desa Jungjang, Kecamatan Arjawinangun.

Desa Jungjang menjadi salah satu dari 135 desa di Kabupaten Cirebon yang akan menggelar pelaksanaan Pilwu serentak tahun ini. Jumlah hak pilihnya sebanyak 8.500 orang. Melihat itu, Komisi I DPRD Kabupaten

Cirebon pun mengunjungi Desa Jungjang. Mereka menjumpai para perangkat desa. Tujuannya untuk bersosialisasi rencana persiapan Pilwu serentak di tengah pandemi ini.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Abdul Rohman mengatakan, pelaksanaan Pilwu serentak di tengah pagebluk ini akan berbeda dengan sebelumnya. Untuk itu perlu ada komite-men dan upaya bersama guna menegakkan aturan protokol kesehatan.

"Permendagri Nomor 72 tahun 2020 atas perubahan Permendagri Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa wajib me-

nerapkan protokol kesehatan dengan maksimal 500 pemilih setiap TPS. Rencana di Desa Jungjang akan ada 18 TPS," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini telah mengesahkan Perda tata cara pelaksanaan pemilihan dan pemungutan suara di masa pandemi. Dengan disahkannya perda, Rohman berharap akan bisa diterapkan pada Pilwu nanti.

"Perda itu hasil aspirasi dari masyarakat yang sangat baik. Tetapi Perbup aturan teknis yang mengaturnya belum disahkan," ungkapnya.

Kuwu Desa Jungjang Sutrisno mengatakan, Pemerintah



Desa (Pemdes) Jungjang siap menyambut momen Pilwu serentak tahun ini. Pemdes pun tengah mendata hak pilih dan merancang pemilihan tempat yang akan dijadikan TPS. Namun untuk persiapan lainnya ia juga masih menunggu aturan yang membahas teknis lengkapnya dari pemerintah daerah.

Pasalnya, melonjaknya kasus Covid 19 di Kabupaten Cirebon menjelang Pilwu telah membuat para warga setempat merasa cemas. Ia Perangkat Desa Jungjang Galih menuturkan, banyak ma-

syarakat yang menanyakan aturan gelaran Pilwu nanti.

"Bagaimana mengatasi tahapan kampanye calon kuwu yang bisa mengundang kerumunan lebih dari 50 orang? Kedua, bagaimana mekanisme pemilihan bagi warga hak pilih yang kondisinya tengah terpapar Covid 19? Terakhir bagaimana standar pakaian panita pelaksana Pilwu. Apakah harus menggunakan alat pelindung diri (APD)?" Tanya Galih.

Menjawab itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon

Hasan Basori menyampaikan, saat ini belum ada aturan larangan kampanye di pilkades nanti. Sebab, Perbup Pilwu masih dalam tahap penggodokan.

"Kalau ternyata perbup mengatakan tidak ada kampanye, berarti tidak masalah. Itu pilihan. Yang terpenting saling jaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan," kata Hasan.

Sementara mengenai warga yang terpapar covid 19 dan dirawat di rumah sakit, kata Hasan, akan tetap memiliki hak untuk memilih. Hanya saja, mereka tidak akan langsung datang ke TPS. Untuk itu, harus disiapkan secara matang dengan sejumlah prosedur.

"Di satu desa saja warga yang terpapar Covid 19 saat ini sudah mencapai puluhan. Saya kira perlu tim khusus untuk memfasilitasi pemilihan demokrasi desa. Nanti hal ini akan kami bahas di Perbup," jelasnya.

Selain itu, Hasan juga mengimbau kepada panitia Pilwu untuk tidak menarik sumbangan dari para calon kepala desa (cakades). Sebab, penarikan dana dari cakades dikhawatirkan menimbulkan tendensi yang tidak baik bagi iklim demokrasi di tingkat desa.

Hasan memaparkan, anggaran Pilwu untuk 138 desa dan 18 kecamatan ini, berasal dari APBN dan APBD senilai Rp 21 miliar. Bahkan, jika dalam pelaksanaan biaya yang tersedia dirasa tidak cukup, panitia bisa menutupnya dengan APBDes.

"Semua biaya dibantu oleh APBN dan APBD. Jika kurang, boleh mengambil APBDes. Jadi panitia jangan coba-coba berdalih meminta dana sumbangan ke cakades. Panitia harus adil. Harus setengah dewa," paparnya.

•Muiz

## Perlu Irigasi Baru Atasi Banjir Sungai Cikanci

Sungai Bendungan Siliwangi disinyalir menjadi sumber persoalan banjir di Desa Kanci Kulon. Komisi III berpendapat perlu irigasi baru.



Foto: Foto: Quasy/Id

Sudah lebih 3 tahun warga desa Kanci Kulon harus menanggung payah ketika musim penghujan tiba. Pasalnya, pemukiman mereka selalu tergenang banjir. Bahkan pada 2018 lalu, ketinggiannya pernah mencapai 80 sentimeter. Hal itu disebabkan luapan Sungai Cikanci yang meluap setelah intensitas hujan yang tinggi.

Hampir tiap tahun banjir kiriman dari Sungai Cikanci tersebut menjadi langganan warga Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Kuwu Kanci Kulon Subandi, mengatakan, kerap mendapat keluhan dari

masyarakat karena persoalan banjir yang membuat resah penduduk. Ia mengaku, jika permasalahan ini sudah terjadi sejak zaman kuwu yang lama.

Subandi mengaku, kiriman air tersebut berasal dari Sungai Bendungan Siliwangi yang berada di Desa Buntet. Namun karena faktor Sungai Cikanci tidak bisa menampung banyak debit air yang banyak, akhirnya tanggul jebol dan merambat ke sawah hingga ke pemukiman warga.

Ia pun menerangkan, jika musim penghujan ketinggian air Sungai Cikanci selalu setingkat drainase saluran. Pemerintah

Desa (Pemdes) Kanci Kulon sebenarnya telah beberapa kali berupaya untuk membenahi drainase namun tetap saja jebol.

"Kalau banjir bisa sampai 5 RW yang tergenang, hampir setengah lebih Desa Kanci Kulon itu terendam. Ya kadang tidak terlalu tinggi, namun tetap saja mengganggu aktifitas masyarakat kita. Kemudian bisa juga menimbulkan penyakit baru. Kalau himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai kami sudah lakukan," terangnya.

Arief, sekretaris Desa Kanci Kulon pun menambahkan, pem-



benahan banjir harus dilakukan dari hulunya terlebih dahulu. Karena Sungai Cikanci, menurutnya, sebagai hilir dari sungai yang di Desa Buntet.

"Sungai di Desa Buntet itu sangat sedikit saluran irigasinya. Kemarin saja dari BBWS menjelaskan kalau Sungai Cikanci bukan akar masalahnya, justru yang harus dibenahi itu sungai di Buntet. Karena di situ lah persoalannya," jelas Arif.

Ketua Komisi III bersama ang-

gota DPRD Kabupaten Cirebon pun mengunjungi Sungai Cikanci guna melihat kondisinya setelah menerima keluhan dari masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana, mengamini persoalan Sungai Cikanci yang sejak lama sering mengalami banjir. Namun ia akan menelaah terlebih dulu siapa yang berwenang membenahi antara provinsi dengan daerah.

Ia pun berpendapat, perlu segera membuat saluran irigasi

baru untuk menghambat luapan Sungai Bendungan Siliwangi agar tak langsung mengalir ke Sungai Cikanci.

"Karena Sungai Cikanci belum siap menerima debit air yang terlalu banyak. Tapi ini akan tetap menjadi bahan evaluasi kita bersama Dinas PUPR nantinya. Kalau pun memang benar ini wewenangnya daerah bukan provinsi. Kami akan segera merealisasikannya, karena takut dampaknya akan melebar ke mana-mana," kata Anton.

Sementara ini, Pemdes Kanci Kulon sebenarnya sering membawa masalah tersebut pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik dari tingkat desa maupun kecamatan. Namun hingga sekarang masih belum menemukan solusi jitu untuk pembuangan airnya. Oleh karena itu, Pemdes berharap agar pemerintah daerah dapat membantu mencarikan solusinya.

"Pada Musrenbang, kami menyarankan agar ada penerobosan jalur akses agar bisa langsung ke sungai. Karena irigasi yang ada sudah tidak bisa menampung kapasitas air yang banyak. Sementara akses pengelolaan sumber daya air (PSDA) pun sering menemukan kebuntuan, karena bingung untuk pembuangannya. Saya sangat berharap agar Bapak dan Ibu Dewan dapat menemukan solusi dengan dinas terkait," tuturnya.

Ia juga sangat berharap, Pemdes Buntet segera membenahi saluran irigasi di Sungai Bendungan Siliwangi, agar dampak banjir di Desa Kanci Kulon akibat kiriman tidak lagi terjadi.

"Saya rasa Desa Buntet segera atasi masalah ini. Kami sebagai warga Kanci Kulon sudah jengah merasakan banjir jika sungai meluap," katanya. •Sar/Lan

## Peserta Jaminan Kesehatan Turun

Kepesertaan jaminan kesehatan Kabupaten Cirebon tengah mengalami penurunan, akibatnya tak lagi memenuhi capaian UHC. Dinkes menengarai akibat penduduk yang bertambah selama pandemi.



foto-foto : Quasy/dk

Untuk menjamin tercapainya cakupan kesehatan semesta, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mengunjungi Kementerian Sosial RI.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina, menyampaikan capaian kepesertaan BPJS di Kabupaten Cirebon yang saat ini tengah menurun akibat populasi penduduk semakin bertambah.

Sebagaimana laporan Dinkes Kabupaten Cirebon, kepeser-

taan *Universal Health Coverage* (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berada di angka 93 persen. Padahal untuk mencapai minimal kepesertaan UHC yang diamanatkan pemerintah pusat setidaknya harus 95 % dari jumlah penduduk.

"Tahun 2020 sudah UHC, namun Juni sekarang turun lagi, karena sebelumnya kita masih menghitung jumlah penduduk 2 juta. Ternyata masa pandemi jumlah penduduk semakin meningkat, jadi hitungan presentasi 95 persennya tidak tercapai," ujar Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon Enny Suhaeni.

Akibatnya, bagi warga yang sedang membutuhkan dan mengajukan permohonan BPJS belum dapat diproses secara cepat, namun harus menunggu minimal 14 hari hingga satu bulan. Siska pun menyampaikan keluhannya kepada Kemensos RI agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat dipindahkan menjadi penerima bantuan iuran (PBI).

"Kita ingin DTKS itu dipindahkan untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBN. Kami sudah mengirimkan surat permohonan dari Dinsos ke Kemensos pada 7



Juni 2021," kata Siska.

Ia pun mengaku, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum sanggup untuk mencapai target 95 persen jika mengandalkan dari APBD yang jumlahnya terbatas. Untuk itu Komisi IV berharap kepada Kemensos agar bisa menindaklanjuti permohonan pemindahan.

"Kepesertaan BPJS saat ini normalnya saja Rp 340 ribu. Artinya harus ada dana sekitar Rp 154 miliar, sementara 40 persen dari bantuan provinsi saja hanya Rp 26 miliar. Kalau menambah, terus terang APBD kita tidak ada. Kalau itu ditarik semua ke PBI yang dibiayai APBN, baru-

lah kita akan bisa menambah capaian UHC kita," ungkap Siska.

Menanggapi itu, Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos Republik Indonesia Agus Zainal Arifin, mengatakan, belum bisa menerima penambahan PBI ini. Pasalnya Kemensos sendiri sedang berkonsentrasi pada bantuan sosial reguler seperti: Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Mengenai PBI APBD yang sudah DTKS, dimulai dari Januari hingga April masih dalam tahap perbaikan data. Untuk itu kami telah sampaikan pada pimpinan kalau kita telah memproses data

PBI. Jadi sebaiknya data PBI yang ada di Kabupaten Cirebon hendaknya divalidasi terlebih dahulu NIK-nya. Agar proses itu lebih cepat," ujar Zainal.

Zainal menjelaskan, kalau PBI ini memiliki dua jenis: DTKS dan non DTKS. Yang non DTKS, bulan lalu belum bisa dimasukkan karena terjadi invalid data. Pasalnya, masih banyak data penduduk yang belum diperbaharui di Kabupaten Cirebon sejumlah 14 ribu NIK.

"Nah, kita berharap agar di daerah segera perbaiki NIK yang invalid itu. Baru akan kita proses. Sebelumnya memang terhenti karena ada proses pembenahan data, tapi sekarang data PBI sedang kita cocokkan lebih dulu dengan data Disdukcapil," jelas Zainal.

Siska mengaku telah mengirimkan surat melalui Bupati ke Kemensos untuk 88.613 DTKS yang telah diperbaharui sejak Oktober 2020 lalu.

"Sekali lagi saya berharap dari 88 ribu itu agar sesegera mungkin ditarik menjadi penerima bantuan iuran. Sementara regulasi Pemendagri itu tidak memperkenankan *double* pembiayaan untuk kesehatan. Makanya kita ingin cepat," harapnya.

Zainal pun meminta jika pembenahan data penduduk harus segera dilakukan. Pasalnya jika tidak diperbaiki dan divalidasi antara data PBI dengan DTKS maka akan merusak dan tak dapat diajukan.

"Kita masih tunggu sampai akhir Juli. Kalau enggak secepatnya akan ada dobel data lagi dan akan merusak data DTKS. Makanya kita harus segera memperbaiki datanya agar lebih cepat. Sementara ini Kabupaten Cirebon ada 14.707 NIK yang belum diperbaiki," tutupnya.

## Bendungan Plester Kawinkan Wisata Alam dan Kuliner

Berbeda dengan saluran pengairan pada umumnya. Warga Desa Leuwidinding memanfaatkan Bendungan Plester sebagai sarana objek wisata. Seperti apa rupanya?



foto-foto : Quasyda

Awalnya, hanya bendungan air biasa. Tak ada yang berbeda dengan bendungan yang lainnya. Namun, berkat sentuhan tangan salah seorang warga, bendungan satu ini tersuguhkan dengan suasana baru. Ia pun berhasil menarik perhatian wisatawan, dan bersiap menjadikannya sebagai objek pariwisata unggul di Desa Leuwidinding, Kecamatan Lemahabang.

“Saya punya ide untuk bikin tempat wisata di sini. Begitu lihat bendungan ini dan dapat konsepnya, saya langsung inisiatif bikin bangunan berupa kedai di sebelahnya,” ucap Nana Sudiana selaku pemantik wisata

Bendungan Plester.

Nana menyampaikan, pada dasarnya, wisata Bendungan Plester ini memiliki konsep rekreasi kuliner yang menawarkan berbagai macam menu khas Cirebon. Diantaranya: nasi liwet, ikan bakar cobek, ayam kampung, es tape khas Desa Leuwidinding dan masih banyak lainnya.

Selain menawarkan konsep kuliner, wisata yang memanfaatkan objek Bendungan Plester ini juga menyuguhkan pemandangan alam. Peralnya, di sekitar kedai dan bendungan tersebut, hamparan lahan hijau milik warga tak kalah mendominasi. Pengunjung pun dapat melihat langsung aktivitas para petani

yang semakin menghidupkan nuansa pedesaan.

Hembusan angin di tepi persawahan ini juga terasa hangat nan sejuk. Sambil menikmati hidangan di kedai, pengunjung akan dimanjakan oleh suasana yang asri jauh dari hiruk pikuk suara kendaraan.

Untuk masuk ke wisata ini, pengunjung tak perlu membayar tiket. Cukup memesan menu yang telah disediakan di kedai tersebut dan bisa langsung menikmati suguhan alam. Sambil sesekali berswafoto di spot yang telah ada.

Sedangkan untuk menuju ke lokasi, jalur yang ditempuh juga cukup mudah. Wisatawan hanya



membutuhkan waktu 15 menit setelah masuk perempatan Cipejuh Sindanglaut. Kemudian dari arah pasar, cukup mengikuti jalan raya dan belok kiri jika menemui perempatan kembali. Setelah itu, Bendungan Plester tepat berada di ujung jalur tersebut.

“Jalannya sih lumayan gampang, lurus terus sampe ujung. Abis itu nyampe dan kita bisa langsung masuk wisata ini. Suasananya juga oke buat ngumpul sama temen-temen,” kata Anah, warga asal Desa Plered.

Pengembangan wisata ini, berawal dari keinginan putra Nana membangun sebuah usaha, sekaligus memberi gebrakan kepada para pemuda di desanya. Terlebih, putranya merupakan salah satu anggota karang taruna. Bersama

dengan kawan-kawan sejawatnya, ia merancang konsep dan perlahan mulai merealisasinya.

“Sebagai seorang ayah, saya mendukung penuh ide dan konsep hasil rumusan anak saya dengan pemuda karang taruna. Saya juga mengkolaborasikannya dengan ide saya. Sebagai bentuk dukungan dan kerja sama, saya mengeluarkan dana sekitar Rp 100 juta sebagai modal awal berdirinya usaha tersebut,” terang Nana.

Sebanyak tiga bangunan saung khas rumah makan pun dibangun. Tak hanya itu, mereka juga menyediakan panggung minimalis untuk *live music* agar terkesan tidak monoton.

“Jadi, para pemuda bisa menggunakan panggung tersebut un-

tuk menyalurkan bakat mereka dalam bidang musik,” kata Nana.

Wisata Bendungan Plester ini baru dibuka sejak Februari lalu dengan dikelola bersama para pemuda karang taruna. Selain memberdayakan pekerja lokal, wisata ini juga mampu memutar roda perekonomian warga yang membuka warung di sekitarnya.

Pemerintah Desa (Pemdes) Leuwidinding pun sangat mendukung adanya wisata Bendungan Plester tersebut. Sebagaimana visi misinya untuk membangun desa wisata. Mereka pun berencana akan mengembangkannya kembali dengan penambahan fasilitas yang lebih memadai dan berbasis edukasi.

“Sejak awal saya sangat *support* adanya wisata itu, kita juga punya target membuat wisata edukasi. Ada tanah titisara yang bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman dan membuat permainan *flying fox*,” jelas Kuwu Desa Leuwidinding Imas Rasdianto.

Hanya saja, Imas mengatakan, pengembangan wisata Bendungan Plester belum bisa direalisasikan sekarang. Peralnya, dana desa yang semestinya dianggarkan untuk bumdes, harus dialihkan untuk penanganan pandemi. Selain itu, Pemdes juga belum memiliki rekomendasi dari dinas.

Imas pun berharap, agar instansi terkait agar bisa menjembatani pemdes dan pengelola untuk pengembangan wisata tersebut. Sebab, katanya, belum ada kejelasan rekomendasi dan jalinan MoU dengan Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Padahal kalau sudah MoU, kita bisa langsung mendatangkan investor yang setidaknya bisa membangun dan mengangkat wisata ini,” pungkasnya. •Sar

## Pilangsari

# Optimalkan Pertanian dan Olahraga

Dua sektor akan menjadi target utama Pemdes Pilangsari agar desa bisa lebih berkembang. Apa saja?



Muadi (Kepala Desa Pilangsari)

alu-lalang kendaraan yang padat begitu tampak saat berkunjung ke Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung. Pasaunya lokasi desa ini berada tepat di sudut perbatasan antara Kota Cirebon dengan Kabupaten Cirebon. Desa Pilangsari memiliki luas sekitar 150 hektar yang terbagi menjadi 2 bagian. Lahan persawahan berarea 45 hektar dan pemukiman warga.

Kuwu Desa Pilangsari Muadi menerangkan, saat ini Pilangsari tengah fokus mengembangkan potensi pertanian. Mereka pun telah sukses mengelola pertani-

an hingga 2 kali panen dengan prosentase 80 persen.

"Saya turut bangga, sektor pertanian telah menjadi tulang punggung ekonomi warga. Meski dari 45 hektar persawahan itu, milik desa hanya 6 hektar namun masyarakat mampu menghasilkan Rp 10 juta dari sekali panen. Kita bertekad akan terus mengembangkan sektor pertanian," jelas Muadi.

Namun harapan itu tak mungkin dicapai jika perairan untuk pertanian tak lancar. Muadi mengeluhkan kondisi perairan yang acapkali tak mendapatkan

jatah pembagian dari Sungai Cipager. Akibatnya petani Pilangsari pun pernah mengalami gagal panen. Ia telah beberapa kali menekankan pengelola perairan Sungai Cipager agar pembagian jatah air bisa merata.

Selain itu, Pemdes Pilangsari juga sedang membangun Gedung Olah Raga (GOR) untuk meningkatkan kreativitas pemuda. Muadi menyampaikan, kalau GOR itu nantinya akan menjadi wadah untuk pengembangan potensi anak-anak juga agar terhindar dari pergaulan bebas.

"Tahun depan GOR ini akan jadi. Saya akan menggandeng semua elemen masyarakat terutama karang taruna agar para pemuda bisa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui olahraga," paparnya.

Kedua target itu, kata Muadi, semata-mata agar desa bisa lebih baik, sekalipun hingga saat ini, Pemdes Pilangsari belum memiliki PADes. Ia mengaku, dalam pembangunan desa, pemdes hanya mengandalkan APBD dari dana desa, kabupaten, maupun provinsi.

"Alasannya karena di sini kebanyakan pemukiman. Pabrik saja tidak ada. Jadi PADes Pilangsari itu nihil. Tanah titisara yang biasanya menghasilkan PAD telah dijual oleh kuwu terdahulu. Tapi saya akan terus mendorong agar Desa Pilangsari bisa lebih berkembang," tandasnya.

## Bobos

# Selangkah Lagi Menuju Desa Mandiri

Pengelolaan Bumdes Madani, jadi salah satu program skala prioritas penggunaan dana desa, agar Desa Bobos beralih menjadi desa mandiri. Seperti apa?



Setelah terpilih menjadi penerima bantuan Bumdes Mart dari Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2020. Desa Bobos saat ini tengah berupaya mengembangkan sektor perekonomian melalui Bumdes Mart. Seperti diketahui, ada empat desa yang mendapatkan bantuan Pemkab tersebut, salah satunya Desa Bobos, Kecamatan Dukupuntang yang dikelola oleh Bumdes Bobos Madani.

"Sekalipun Bumdes Mart baru mampu untuk perputaran modal dan upah karyawan saja.

Belum bisa memberi kontribusi untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD)," jelas Abdullah, Sekretaris Desa Bobos.

Namun ia mengaku, pada tahun 2021 ini, Pemerintah Desa (Pemdes) Bobos berencana untuk menambahkan permodalan Bumdes Bobos Madani melalui APBDes 2021. "Sudah dianggarkan Rp 36 juta ditahap dua nanti. Karena untuk saat ini, Bumdes Mart masih mengandalkan dana bantuan pemerintah saja. Jadi akan kita tambahkan lagi modalnya," papar Abdullah.

Penambahan modal itu menurut Abdullah, diharapkan bisa menambah pemasukan untuk PAD Desa Bobos agar berangsur-angsur menjadi desa mandiri. Pemdes akan berupaya agar PAD bisa meningkat.

Selain itu, upaya lain yang juga dilakukan Pemdes demi mencapai desa mandiri. Pemdes Bobos bertekad program pengelolaan Bumdes menjadi salah satu skala prioritas bagi penggunaan anggaran dana desa. Pasaunya desa dituntut untuk mulai mandiri dalam sektor perekonomian. Ia pun berencana akan berinovasi bagi keberlangsungan Bumdes Madani.

Sementara ini, sektor PAD Desa Bobos baru mampu diperoleh dari sewa kios yang berada di Pasar Keramat. Rata-rata pedagang menyewa dengan harga Rp 2 sampai 4 juta per tahun tergantung ukuran dan luas kios.

"Ada sekitar 60 kios milik kita yang telah memberikan pemasukan PAD sebesar Rp 260 juta pada tahun 2020," ujarnya.

Namun, Abdullah memaparkan, para pedagang merasa keberatan mengenai biaya sewa yang mahal dalam satu tahun. Pemdes Bobos pun memberi pilihan bagi pedagang dengan cara membayarnya perminggu. "Nanti, Bumdes Bobos Madani akan mengambil alih pengelolaan Pasar Keramat," pungkas Abdullah. •Soy

## Panguragan Kulon Miliki Kantor Megah Berkat Rongsokan

Menyandang gelar desa rongsokan, siapa sangka hasilnya mampu tunjang bangunan kantor desa yang megah.



H. Kusyono (Kepala Desa Panguragan Kulon)

Bukan aneh jika tumpukan barang bekas nampak tersusun di sepanjang tepi jalan Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan. Pemandangan demikian tak asing bagi sebagian masyarakat Cirebon yang kerap melintas. Pasalnya, desa ini merupakan salah satu sentra industri barang bekas yang produktif.

Tumpukan barang-barang bekas yang dimasukkan dalam puluhan karung tampak menggunung di salah satu rumah warga Desa Panguragan Kulon. Mereka terbiasa tidak membuang barang yang sudah rusak begitu saja. Sebagian warga menyebutnya sebagai pundi-pundi yang

mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Tak sedikit warga Desa Panguragan Kulon yang memilih bekerja dengan mencari barang bekas atau rongsokan untuk pendapatan ekonominya. Dari jumlah penduduk 7.521 jiwa, sebanyak 20 persen warga tercatat bermata pencaharian sebagai pencari barang bekas.

"Alhamdulillah warga tidak ada yang kekurangan makan, karena di sini, sampah pun bisa jadi uang untuk membeli kebutuhan pangannya," ucap Kuwu Desa Panguragan Kulon Kusyono.

Umumnya, warga mencari barang bekas di sekitar wilayah Cirebon. Namun ada pula yang

rela memburunya hingga ke luar daerah seperti Tegal hingga Surabaya. Mereka berkenan pergi jauh demi mengumpulkan barang bekas yang bisa dikonversikan bernilai. Penghasilan mereka pun bervariasi, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per hari.

Desa Panguragan Kulon, memang dikenal sebagai salah satu desa rongsokan di Kecamatan Panguragan. Predikat itu, telah melekat sejak dulu karena banyaknya masyarakat yang menekuni usaha tersebut.

Dengan banyaknya para pencari barang bekas di desa ini, maka tak sedikit beberapa warga bahkan menyandang status sebagai pengepul atau bos rongsokan dengan omset puluhan juta. Salah satunya adalah Kusyono sendiri, selain menjadi kepala desa, ia juga dikenal pengusaha rongsok di Desa Panguragan Kulon.

Kusyono mengaku, telah menggeluti bisnis rongsok sejak tahun 2002 silam. Ketika itu, ia masih menjalani dinas kepolisian di Kantor Polres Cirebon. Saat jam tugasnya selesai, ia segera mengambil alih profesi sampingannya itu sebagai pencari barang bekas.

"Saya tidak malu, warga yang menggeluti di bidang rongsok pun tidak perlu malu. Ini halal, mendatangkan rezeki untuk menghidupi keluarga di rumah," akunya.

Dari kontribusi para pencari rongsok pun, alhasil dapat membantu pembangunan kantor Desa Panguragan Kulon yang baru. Pemdes Panguragan Kulon saat ini memiliki kantor desa yang baru berwarna putih dengan desain mewah.

"Biar lebih layak untuk menunjang pelayanan masyarakat dan mereka merasa nyaman saat datang ke kantor desa," kata Kusyono. •Sar

## Ciawigajah Sukses Daur Ulang Sampah

Selain Ciawiwater, kini Ciawigajah juga sukses kembangkan pengolahan sampah menjadi pupuk. Bagaimana caranya?



Nunung Nurhadi (Kepala Desa Ciawi Gajah)

Desa Ciawigajah Kecamatan Beber patut menjadi contoh. Selain berhasil memproduksi air minum dalam kemasan Ciawiwater, mereka juga sukses menangani persoalan sampah. Melalui badan usaha milik desa (Bumdes), pemerintah Desa Ciawigajah terus menggalakkan pengolahan sampah demi terciptanya kampung bersih nan sehat.

"Persoalan sampah ini bukan hanya bersentuhan dengan benda mati, tetapi juga perilaku kehidupan masyarakat dan pola pikirnya pun perlu diubah. Sejak tahun 2016 kita sudah sosialisasi ke masyarakat mengenai bahaya sampah dan tahun 2018 kita mulai mengolahnya," jelas Kuwu Ciawigajah Nunung Nurhadi.

Nunung mengatakan, sebe-

lum sampah diolah, Bumdes Ciawigajah akan mengangkut sampah dari rumah-rumah warga terlebih dulu dengan sistem abonemen. Bagi warga yang berlangganan dikenakan iuran Rp 10 ribu rupiah per bulan untuk pemungutan sampah seminggu dua kali. Sementara yang tidak, mereka membuang sampah langsung ke tempat yang telah disediakan oleh pemdes.

Untuk mengangkut sampah sampai tahap pengolahannya, Bumdes Ciawigajah membutuhkan waktu dua hari. Mereka pun akan mendatangi satu persatu rumah.

"Jadi sampah warga yang telah disiapkan di depan rumahnya kita akan angkut dan pilah," ujar Nunung.

Sementara untuk pengolahan sampahnya, Bumdes Ciawigajah

menggandeng pemuda pribumi lulusan pertanian Universitas Yogyakarta. Alhasil, sampah rumah tangga tersebut mampu diolah menjadi pupuk organik. Mereka juga menyediakan sawah percontohan seluas satu hektare untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang tatacara penanamannya kembali ke alam.

"Kita katakan kepada masyarakat bahwa sampah itu juga membawa keberkahan. Pupuk organik tersebut dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dari 4 ton menjadi 8 ton. Pupuk itu cocok untuk ubi, padi dan sayur mayur di desa kita. Bahkan pohon kelengkeng yang bertahun-tahun tidak berbuah juga jadi berbuah banyak," kata Nunung.

Di samping itu, bumdes Ciawigajah juga tak tinggal diam mengenai sampah non organik. Mereka sudah membuat dua buah mesin pencacah plastik, untuk menghancurkan sampah-sampah plastik yang kemudian akan dijual.

"Jadi pengolahan sampah di desa kami baik organik dan non organik sudah dalam pengembangan. Tinggal manajemen dan pendistribusiannya. Insyallah selanjutnya pengelolaan pencacahan plastik akan diserahkan kepada pemuda karang taruna sekaligus dengan pelaksanaan program petani milenial," ucap Nunung.

Nunung berharap, pengembangan sampah organik dan non organik tersebut dapat lebih optimal setelah menggandeng para pemuda di desanya. Ia juga mengatakan saat ini tim pengolahan sampah organik sudah memiliki 25 orang karyawan, dan pengolahan sampah non organik 15 orang.

"Nantinya akan diberi upah juga sesuai standar UMR," pungkasnya.

Mohamad Luthfi



## Haji Udin Vs Haji Belanda

ni cerita unik. Obrolan *ndeso*, tapi cukup mengusik pikiran. Siang itu, sohib saya, sebut saja bernama Udin (bukan nama sebenarnya), menolak di depan namanya dicantumkan huruf H. Ia kukuh agar di dokumen itu hanya tertulis namanya saja.

“Saya bilang gak usah, malu saya kalau ada huruf “H” di depan nama. Saya malu kalau nanti masuk neraka, masa haji kok masuk neraka,” jelasnya terlihat serius.

“Ah, paling kamu malu kalau nanti mau masuk ke diskotik. Masa haji kok masuk tempat ajojing,” timpal Wasta.

“Hus.. enak bae, aja maning gelar haji, gelar sarjana saja gak saya pakai. Malu, kalau nanti masuk neraka, masa sarjana masuk neraka,” balas Udin.

“Ya kamu masuk surga dong,” ucap Wasta mencoba mematahkan argumen Udin. “Nah, bener Ta, setuju! Lebih enak gitu, gak pake gelar haji, gelar sarjana, tapi masuk surga,” sambut Udin sambil terkekeh.

Percakapan singkat dua sohib di atas cukup membuat saya merenung. Buat apa sih gelar? Hanya tanda bahwa kita pernah sekolah? Hanya tanda kita pernah ibadah haji?

Memang aneh juga, kok ibadah bisa jadi gelar. Padahal, jika kita menengok sejarah, gelar haji adalah alat penjajah Belanda untuk mengawasi gerak umat Islam. Untuk menandai orang-orang yang dianggap berbahaya oleh penjajah.

Hasyim Asy’ari, Ahmad Dahlan, dan H.O.S Tjokroaminoto adalah sedikit nama dari para tokoh pergerakan, yang seusai haji mendirikan organisasi dan mengusung wacana nasionalisme. Tentu saja itu sangat berbahaya bagi penjajah kala itu.

Maka, Belanda pun mengeluarkan *Pilgrims Oordonnantie Staatsblad* 1903 Nomer 26, *Staatsblad* 1922 Nomor 698, *Staatsblad* 1927 Nomor 508, dan *Staatsblad* 1931 Nomor 44. Deretan *Oordonnantie* itu untuk pembatasan ibadah haji dan memantau aktivitas jamaah kembalinya ke Tanah Air.

Selain itu, *Oordonnantie* juga melarang orang asing, terutama dari Arab, berkunjung ke daerah Indo-

nesia karena dianggap melakukan provokasi. Tokoh masyarakat seperti sultan, kaum priyayi, penguasa daerah, dan abdi dalem dilarang pergi haji. Mereka dikhawatirkan akan menjadi poros pergerakan melawan penjajah.

Masih satu paket, Pemerintah Kolonial Belanda membuka Karantina Haji di Pulau Onrust, Teluk Jakarta. Karantina ini tentu saja dengan alasan mencegah peneluran penyakit. Aslinya banyak jamaah yang jika dinilai akan menimbulkan masalah bagi penjajah, maka hidupnya akan diakhiri.

*Oordonnantie* juga mengharuskan bagi yang sudah berhaji untuk selalu mencantumkan gelar haji di depan namanya. Ini bertujuan agar mudah diawasi. Jadi, singkatnya, haji itu berbahaya bagi penjajah.

Nah, jika dulu sebutan haji dijadikan alat penjajah untuk memata-matai gerak penyandangannya, kini seolah menjadi gelar. Mirip-mirip gelar kesarjanaan. Mudah-mudahan hanya sebatas gelar, bukan mendistorsi ibadah menjadi kebanggaan.

Sebentar lagi musim haji, pemerintah Indonesia sudah memutuskan, karena pertimbangan pandemi, tidak memberangkatkan jamaah haji. Pemerintah Arab Saudi pun membatasi secara ketat pelaksanaan haji tahun ini.

Mari mengambil hikmah, yakinlah bahwa itu semua yang terbaik buat kita semua. Sekaligus memberi kesempatan kepada kita untuk merenung, meluruskan niat. Barangkali ada niat yang belum pas. Terutama bahwa berhaji itu ibadah, bukan untuk mencari gelar.

Namun, jika gelar itu disematkan untuk menjauhi kemaksiatan dan membatasi diri (seperti penjajah Belanda), ya boleh-boleh saja. Kalau pun menganut keyakinan seperti teman Udin di atas juga boleh-boleh saja.

Yang jelas, gelar haji hanya penanda bahwa seseorang pernah berhaji, dan gelar sarjana hanyalah tengara bahwa kita pernah sekolah. Gelar tidak sepenuhnya mencerminkan diri seseorang. Gunakan semestinya, dan luruskan niat.



SEKRETARIS DPRD DAN SELURUH PEGAWAI

Mengucapkan:



01 JUNE

Selamat Hari Lahir  
**PANCASILA**



PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

**Mengucapkan:**



Selamat Hari Lahir  
**PANCASILA**

1 Juni 1945 - 1 Juni 2021